

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Uswetun Hasanah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2013. E-mail : Hasanah_uus@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program Jampersal tersebut. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan ini yaitu kurangnya penyaluran informasi dan minimnya sumber daya peralatan dalam melaksanakan program Jampersal di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Melalui penulisan artikel ini bertujuan agar pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang terus dilaksanakan secara efektif, sehingga masyarakat atau ibu hamil patuh dan mau mengikuti program Jampersal ini. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu masih saja ada ibu hamil yang belum mengetahui tentang adanya program Jampersal dan kurangnya ketersediaan alat-alat kesehatan di Poskesdes Simpang Kanan seperti tidak adanya alat-alat periksa, timbangan berat badan, obat-obatan, tidak ada tempat tidur dan tidak ada peralatan lainnya yang tersedia hanyalah kursi, meja serta lemari yang sudah tidak tertata rapi. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara efektif.

Kata kunci: Pelaksanaan Program Jampersal, kurangnya penyaluran informasi, fasilitas kesehatan kurang memadai.

Abstract

Implementation of the Childbirth Insurance program in Village Simpang Kanan Sub-district Sungai Ambawang Regency Kubu Raya is still ineffective because there are some factors that influence in implementation process of the Childbirth Insurance program. The problems in the implementation of the Childbirth Insurance program that lack of information distribution and lack of equipment resources to implement the Childbirth Insurance program in Village Simpang Kanan Sub-district Sungai Ambawang Regency Kubu Raya. Through this article that aims to make the implementation of the Childbirth Insurance program in Village Simpang Kanan Sub-district Sungai Ambawang continue to be implemented effectively, so that people or pregnant women is submissive and willing to follow the Childbirth Insurance program. The method that is used is descriptive method with qualitative data analysis . The results of research that there are still pregnant women who do not know about the existence of the Childbirth Insurance program and lack availability of medical equipment in Village Simpang Kanan health post such as there is no tool to check, weight scales, drugs, bed and other equipment that is available only chairs, tables and cupboard that are not neat . with thus is expected in order that the implementation of the Childbirth Insurance program in Village Simpang Kanan Sub-district Sungai Ambawang Regency Kubu Raya can run effectively.

Keywords: Childbirth Insurance Program Implementation, lack of information distribution, inadequate health facilities.

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan khususnya pada pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal ini, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan yakni dengan pemberian Jaminan Persalinan yang merupakan perluasan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan tidak hanya mencakup pada masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan ini terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Jaminan Persalinan tersebut secara tegas mulai efektif diberlakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.

Jaminan Persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan pelayanan KB oleh

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan umum dari Program Jampersal ini yaitu dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Adapun syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Jampersal yaitu dengan melengkapi persyaratan berupa fotocopy KTP yang berlaku dan fotocopy kartu keluarga (KK) kemudian ibu hamil mendapatkan buku panduan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Sebagai kebijakan publik yang relatif masih baru diresmikan pada bulan Januari tahun 2012 yang lalu, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia baik di seluruh kota maupun di pelosok desa. Namun pelaksanaan Jampersal diduga masih kurang efektif sesuai dengan target yang hendak dicapai. Misalnya di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang dalam pelaksanaan program Jampersal yang berjalan belum efektif, dimana masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Jampersal tersebut. Berdasarkan faktor tersebut, yang menjadi kondisi faktual di Desa Simpang Kanan dapat dilihat dari komunikasi yaitu penyaluran informasi oleh implementor kelapisan masyarakat khususnya bagi ibu hamil tidak terealisasi dengan baik. Di desa Simpang Kanan, berkaitan dengan sumber daya mengenai fasilitas kesehatan yang tersedia relatif masih minim.

Fokus penelitian: Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan Jampersal yang dilihat dari aspek komunikasi dan sumber daya mengenai fasilitas kesehatan. Rumusan penelitian: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya? Tujuan penelitian: Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial untuk dapat mencapai keberhasilan kebijakan. Hal ini didasarkan bahwa suatu kebijakan atau program haruslah diimplementasikan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2007:174-202) Implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

“Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan”.

Uswetun Hasanah

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa:

“after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice”

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, dalam hal ini peneliti akan menguraikan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Jika kita tinjau dari implementasi Program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan, untuk dijadikan sebagai acuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Jaminan persalinan di Desa Simpang Kanan maka sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Edwards III (dalam Subarsono, 2001:90) bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi

diantaranya yaitu: komunikasi dan sumber daya atau fasilitas kesehatan yang menjadi kendala tentang keberhasilan program Jaminan persalinan di Desa Simpang Kanan yaitu terlihat pada:

1) Komunikasi

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010:97) komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Adapun menurut Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) bahwa variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurut Edwards III sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam

mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

a) *Tranmisi*: penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melampaui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Sedangkan menurut Edward III (dalam Indiahono, 2009:48), komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2) Sumber Daya

Menurut Edwards III (dalam Indiahono, 2009:48) yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah

kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, salah satunya adalah:

- a) *Fasilitas*; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan proses pelaksanaan program Jampersal di Desa

Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara efektif. Secara teoritis dapat memperkaya kajian ilmu kebijakan publik khususnya tentang implementasi program Jaminan Persalinan dan dapat digunakan sebagai kajian referensi untuk penelitian sejenisnya. Sedangkan secara praktis diharapkan agar timbulnya wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti untuk mengkaji suatu fenomena yang terjadi di lapangan mengenai masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik. Bagi pemerintah agar dapat mengklarifikasi fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang menjadi penghambat keberhasilan implementasi kebijakan program Jampersal dengan harapan tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyaluran informasi dan sumberdaya mengenai fasilitas kesehatan dalam proses implementasi program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, maka dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu informan yang dapat dimintai data/informasi atau sebagai sumber informasi yang bertanggung jawab dalam proses implementasi program Jampersal di Desa Simpang Kanan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Oleh karena itu, pengumpulan data primer mempergunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara ditujukan kepada informasi kunci yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kepala Puskesmas Parit Timur, dan Tenaga Medis Desa Simpang Kanan. Selain itu, peneliti juga meminta informasi kepada ibu hamil Desa Simpang Kanan. Pengumpulan data sekunder bersumber dari Kepala Puskesmas Parit Timur dan Tenaga Medis Desa Simpang Kanan.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles and Huberman, yaitu *data reduction* (data reduksi), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uswetun Hasanah

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

a. Komunikasi (Penyaluran Informasi)

Di dalam proses implementasi program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan program Jampersal ini adalah komunikasi yaitu penyaluran informasi yang dilakukan oleh implementor atau pelaku kebijakan kepada seluruh ibu hamil tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik. Untuk melihat proses komunikasi mengenai program Jampersal di Desa Simpang Kanan yaitu dapat dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan keseluruhan masyarakat atau ibu hamil yang ada di Desa Simpang Kanan agar program Jampersal tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh ibu hamil.

Hasil wawancara peneliti, terkait dengan peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dari Kabupaten telah dilaksanakan ke puskesmas karena hal ini berjenjang dari pusat ke provinsi dari provinsi ke kabupaten dari kabupaten ke puskesmas. Puskesmas kite nih ada 19 termasuklah Parit Timur itu. Nah, nanti di Parit Timur ini mensosialisasikan ke pustu dan

polindes seperti yang ada di Desa Simpang Kanan itulah” (HM. Juni 2013).

Berdasarkan dari ungkapan Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya yang telah dikemukakan di atas bahwa sosialisasi atau penyaluran informasi mengenai pelaksanaan program Jaminan Persalinan telah dilakukan secara efektif. Penyaluran informasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari atas sampai ke bawah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya mensosialisasikannya kepada 19 puskesmas yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang termasuk juga Puskesmas Parit Timur. Kemudian Puskesmas Parit Timur inilah yang mensosialisasikannya keustu atau polindes/ poskesdes termasuk juga poskesdes Desa Simpang Kanan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Parit Timur yang mana puskesmas Parit Timur ini merupakan induk dari Desa Simpang Kanan, mengatakan bahwa:

“Kita kan disini ada rapat bulanan dan, jadi kita di sini mengundang bidan-bidan dan disaat rapat itulah kita memberikan informasi mengenai program Jampersal ini dan juga disaat posyandu kita kasi tau pada kadernya dan pada ibu-ibu hamil yang periksa itu kan, yaa kita tetap kasi tau kalau ibu hamil tetap

periksanya di bidan dan nanti kalau melahirkan ketenaga kesehatan. Jadi banyak cara yang kita sampaikan ke masyarakat”. (Mul.Juni 2013)

Berdasarkan ungkapan Kepala Tata usaha Puskesmas Parit Timur yang telah dipaparkan di atas bahwa penyaluran informasi mengenai pelaksanaan program Jampersal telah dilakukan dengan cara mengundang bidan-bidan pada saat rapat bulanan untuk memberikan informasi tentang program Jampersal tersebut. Selain itu juga, penyaluran informasi yang dilakukan oleh Puskesmas Parit Timur dengan memberikan informasi kepada kader-kader posyandu dan bagi ibu hamil yang periksa kehamilannya pada saat adanya posyandu dari setiap poskesdes yang menginduk pada Puskesmas Parit Timur.

Selanjutnya, pertanyaan yang sama diajukan pula oleh peneliti kepada tenaga medis yang berperan aktif dalam pelaksanaan program Jampersal di Desa Simpang Kanan, beliau mengatakan bahwa:

“Komunikasi mengenai program jampersal ini telah kami lakukan sehingga dapat ditanggapi oleh masyarakat. Akhirnya dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi karena masyarakat menerima dengan adanya program Jampersal ini. Penyaluran komunikasi yang

kami sampaikan dengan adanya penyuluhan waktu di posyandu. Nanti apabila masyarakat itu tidak mengerti, kita kasih pemahaman sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh masing-masing masyarakat”. (BJ. Juni 2013)

Apa yang telah diungkapkan oleh tenaga medis di Desa Simpang Kanan mengatakan bahwa program Jampersal di Desa Simpang Kanan telah diinformasikan kepada ibu-ibu hamil yang periksa kehamilannya pada saat adanya posyandu. Penyaluran informasi mengenai program Jampersal tersebut disampaikan oleh Bidan Jubaida dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh ibu hamil.

Dengan adanya komunikasi yang disampaikan oleh pelaku kebijakan mengenai program Jampersal bertujuan untuk menyebarkan informasi agar pelaksanaan program Jampersal di Desa Simpang Kanan terus berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh implementor atau pelaku kebijakan telah berjalan dengan baik. Apabila penyaluran informasi telah berjalan dengan baik maka akan menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Namun sebaliknya, jika penyaluran informasi terjadi kesalahan

maka akan menimbulkan kegagalan implementasi. Penyaluran informasi mengenai program Jampersal di Desa Simpang Kanan yang telah disampaikan melalui penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut kepada seluruh masyarakat atau ibu hamil dengan tujuan agar ibu hamil dapat mengetahui dan memahami tentang program Jampersal tersebut sehingga pada akhirnya ibu hamil dapat ikut serta sebagai peserta Jampersal dengan ketentuan syarat yang harus dilengkapi.

Terkait dengan penyaluran informasi yang telah dilakukan atau disampaikan oleh implementor kepada seluruh masyarakat atau ibu hamil tentang program Jaminan Persalinan, peneliti menanyakan kepada warga yang ikut serta sebagai peserta Jampersal, beliau mengatakan bahwa:

“Engko’ se olle si tentang program Jampersal waktu bedenah posyandu se elak laksana aki pada 1 bulan 1 kali, jadi pada saat Posyandu lah informasi program Jampersal jiyah eberi’ taoh bi’ bidan juah”. (KT. Juni 2013)

(Saya yang dapat tentang program Jampersal waktu adanya posyandu yang dilaksanakan pada 1 bulan 1 kali, jadi pada saat posyandulah informasi program Jampersal ini diberi tahu oleh Bidan itu)

Apa yang disampaikan oleh ibu hamil tersebut sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa pada saat adanya posyandu yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali di Desa Simpang Kanan penyaluran informasi tentang program Jampersal disosialisasikan oleh bidan kepada ibu hamil tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penyaluran informasi tentang pelaksanaan program Jampersal di Desa Simpang Kanan telah disosialisasikan dengan baik oleh Bidan kepada para ibu hamil pada saat posyandu berlangsung yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Tetapi kenyataan yang ada di Desa Simpang Kanan bahwa komunikasi yang disampaikan ini hanya pada saat posyandu saja dan peneliti tidak menemukan komunikasi yang menggunakan media seperti sepanduk atau baliho yang terletak di poskesdes karena dengan menggunakan alat tersebut maka dengan jelas dan mudah untuk dapat dibaca dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat atau ibu hamil mengenai program Jampersal ini sehingga akan menimbulkan minat masyarakat untuk mau mengikuti program Jampersal. Sedangkan masih saja terdapat sebagian ibu hamil tidak mengetahui dan tidak memahami tentang adanya program Jampersal ini dikarenakan di Desa Simpang Kanan masih saja ada masyarakat atau ibu hamil yang enggan untuk memeriksakan kandungannya sampai masa kelahiran. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa yang mendapatkan informasi mengenai program Jampersal ini hanya masyarakat atau ibu hamil yang pergi ke posyandu saja. Berdasarkan dari hal ini, maka program Jampersal di Desa Simpang Kanan tidak seluruhnya dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat Desa Simpang Kanan.

b. Sumberdaya (Fasilitas)

Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi implementasi program Jampersal adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga menjadi faktor pendukung untuk melaksanakan program Jampersal ini. Karena meskipun jumlah staf dan kemampuan staf telah memadai tetapi tidak didukung oleh fasilitas kesehatan atau sarana dan prasarana berupa alat pakai yang dibutuhkan bagi ibu hamil seperti obat-obatan, alat periksa darah, timbangan berat badan dan alat habis pakai seperti suntikan, infus serta peralatan lainnya maka program Jampersal ini tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Mengenai fasilitas kesehatan atau sarana dan prasarana di Desa Simpang Kanan maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya mengatakan bahwa:

“Kalau saye liat memang poskesdes ini di Desa Simpang Kanan saye rase masih adelah kekurangan tapi kekurangan itukan bukan berarti tak bise nolong orang, seperti kite juga

tuhan ciptakan kite masih adelah kekurangannye kan, tetapi kekurangan itu tidak dijadikan masalah bahwa masyarakat tidak mau ditolong oleh tenaga kesehatan. Menurut saye cukup memadailah karna poskesdes sudah ada, tenaganya sudah ada, peralatannye pun cukuplah. (HM. Juni 2013)

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya di atas mengatakan bahwa Posksdes di Desa Simpang Kanan masih ada kekurangannya tetapi dengan adanya kekurangan peralatan tersebut tetap saja tenaga kesehatan di Desa Simpang dapat menangani masyarakat atau ibu hamil.

Pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Parit Timur, yang mengatakan bahwa:

“Kalau bangunan kita itukan di daerah Simpang Kanan itu memang....yaa bukan tidak layak tapi memang kondisi bangunannya belum memadai jadi kalau dibilang layak juga kalau dilihat kondisinya masih jauh itukan tapi yang jelas, yaa apapun yang ada di lapangan kita tetap berupaya memberikan yang terbaiklah dengan apa yang ada disitu baik itu dari sarananya maupun tenaga medisnya”. (Mul. Juni 2013)

Apa yang telah diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Parit Timur bahwa kondisi bangunan Poskesdes Simpang Kanan memang belum memadai dan belum bisa dikatakan layak. Tetapi pelaksana kebijakan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada ibu hamil.

Pernyataan mengenai fasilitas kesehatan di Desa Simpang Kanan juga disampaikan oleh tenaga medis Desa Simpang Kanan yang mengatakan bahwa:

“Fasilitas di Poskesdes cukup mendukunglah, alat-alat untuk melahirkan dan obat-obatannya pun cukup, kalau emang ada ibu hamil yang mau melahirkan pasti bisalah kita tangani selama dia melahirkan dengan normallah. Dan harapan ibu semoga nanti fasilitas di Poskesdes lebih lengkap lagi dari saat ini”.(BJ. Juni 2013)

Pernyataan di atas yang diungkapkan oleh Bidan tersebut mengatakan bahwa fasilitas di poskesdes Simpang Kanan cukup mendukung seperti alat-alat untuk melahirkan dan obat-obatan pun ada. Selama ibu hamil bisa melahirkan dengan normal sarana dan prasarana di Poskesdes Simpang Kanan bisa ditangani oleh bidan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas menunjukkan bahwa sumber daya berupa sarana dan prasarana di Poskesdes Simpang Kanan dalam proses pelaksanaan program Jampersal cukup mendukung meskipun fasilitas

kesehatan atau bangunan Poskesdes Simpang Kanan kurang mendukung.

Untuk itu, mengenai fasilitas kesehatan atau Poskesdes Simpang Kanan peneliti mengajukan pertanyaan kepada warga Desa Simpang Kanan yaitu ibu hamil sebagai peserta Jampersal, mengatakan bahwa:

“Yee.. kalau fasilitas kesehatan di sini ada, itu Poskesdes. Tapi tutup terus Poskesdesnya. Di dalamnya masih banyak kosong alat-alatnya dan Poskesdesnya pun kecil”. (ML.Juni 2013)

Apa yang diungkapkan dari warga Desa Simpang Kanan di atas mengatakan bahwa sumber daya berupa fasilitas kesehatan atau Poskesdes Desa Simpang Kanan kurang mendukung dikarenakan alat-alatnya yang tidak tersedia di Poskesdes dan Poskesdesnya yang tidak digunakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Komunikasi berupa penyaluran informasi dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum terealisasi dengan baik. Oleh karena itu sebaiknya diperlukan pembuatan baliho, spanduk atau pamflet dan dapat disosialisasikan keseluruh warga yang

ada di Desa Simpang Kanan agar pelaksanaan program Jampersal tersebut dapat sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat atau ibu hamil Desa Simpang Kanan.

- b. Sumber daya peralatan berupa fasilitas kesehatan atau Poskesdes Simpang Kanan untuk mendukung pelaksanaan program Jampersal kurang memadai. Di dalam Poskesdes masih banyak alat-alat yang kosong dan Poskesdes Desa Simpang Kanan yang selalu tutup atau tidak dipergunakan. Oleh karena itu sebaiknya perlu adanya perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan bagi ibu hamil dan sebaiknya Poskesdes tersebut setiap harinya selalu dibuka dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya agar dapat mempermudah ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya sampai proses persalinan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Administrasi Publik: Model Konsep dan Aplikasi*. Gaya Media; Yogyakarta.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta; Bandung

Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing; Malang.

Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo; Yogyakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Uswetun Hasanah
 NIM / Periode lulus : E01109053
 Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/HP : Hasanah-uv@ yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan jaminan persalinan (ampersal) di Desa Simpang Kanon Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal26.....2014

 Dr. An. Jir, S.Sos.M.AB
 NIP. 097105021991021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 26 Februari 2014

 (Uswetun Hasanah)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Soslologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload-supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).